

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kegiatan suatu perusahaan terkadang sangat berpengaruh akan kondisi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan tersebut tak terkecuali dengan PT. TIMAH TBK di Pangkal Pinang beberapa program yang dibentuk tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan nilai kesejahteraan sosial masyarakat sekitar tersebut.

Program bina lingkungan dan pembedayaan dan pengembangan masyarakat (PPM) di PT Timah Tbk di Pangkal Pinang merupakan salah satu program sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat tersebar di berbagai wilayah. Program-program yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab sosial tersebut mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan infrastruktur. Meskipun perusahaan ini berada pada wilayah Pangkal Pinang, tetapi dampak program ini dirasakan di berbagai daerah tidak terkecuali wilayah luar Pulau Bangka Belitung yang merasakan dampak program PPM tersebut.

Seperti yang diketahui perusahaan penambangan PT. Timah adalah perusahaan pertambangan timah terbesar di Provinsi Bangka Belitung. PT. Timah Tbk adalah Perusahaan Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan timah sebesar 35% kepemilikannya dimiliki oleh publik yang menjadikan perseroan ini *go public*. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membuat perusahaan mandiri dan transparan dalam pengoperasiannya. Sebagai perusahaan penambangan timah terbesar di dunia, 3 PT. Timah (Persero) Tbk. menguasai hak penambangan timah seluas 522.460 hektar dengan 114 Kuasa penambangan (KP) baik di darat (*onshore*) maupun di laut (*offshore*) dengan wilayah operasi yang meliputi Provinsi Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau (<http://www.timah.com>).

Aktivitas dalam dunia bisnis sekarang selalu dihadapkan dalam kondisi yang membingungkan. Di satu sisi perusahaan harus mencari keuntungan yang besar, sedangkan di sisi lain perusahaan harus memberi tanggung jawab sosial

perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut membuat para manajemen perusahaan harus lebih aktif lagi guna mencari keuntungan dalam kegiatan operasional perusahaan. Program Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) pada PT. Timah ini dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan mengingat perusahaan tersebut berdiri dan melakukan kegiatan operasional di sekitar wilayah masyarakat. Selain itu, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) berperan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai kesejahteraan sosial kepada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, program ini dapat menstabilkan efek dari kegiatan operasional yang dihasilkan perusahaan agar masyarakat sekitar dapat merasakan pula keuntungan dari berdirinya perusahaan di wilayah tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dilakukan di atas, maka peneliti akan memfokuskan pada “Implementasi Program Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian ini peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah yang merupakan keingintahuan peneliti. Berdasarkan dengan data dan paparan di atas bisa dirumuskan bahwa implementasi Program PPM dari PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang dapat membantu meningkatkan nilai kesejahteraan sosial untuk masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, di perumusan masalah ini akan diuraikan pada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk program PPM PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.
2. Bagaimana proses implementasi program PPM PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.
3. Apa manfaat yang masyarakat dapat dari program PPM PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam pelaksanaan penelitian berkaitan dengan data dan untuk apa data tersebut dihimpun kemudian diolah penelitian sehingga menjadi sebuah karya yang mampu berguna secara teoritis dan praktis. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan bentuk program PPM PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.
2. Mendeskripsikan proses implementasi Program PPM PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.
3. Mendeskripsikan manfaat yang masyarakat dapatkan dari program PPM PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dengan baik secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat di salurkan pada pengembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didapatkan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami arti dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang masyarakat dapatkan dari PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian berusaha untuk menggambarkan tentang kesejahteraan masyarakat yang didapatkan melalui program Pemberdayaan dan Pengembangan

Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Alwasilah (2012: 100) menyatakan bahwa:

“penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada suatu fenomena yang tidak memiliki *generalizability* dan *comparability*, tetapi memiliki *internal validity* dan *contextual understanding*”.

Pendekatan kualitatif tidak memiliki *generalizability*, yang berarti fenomena atau temuan-temuan penelitian itu tidak dapat diterapkan pada situasi lain atau digeneralisasikan, melainkan temuan berdasarkan pendekatan kualitatif lebih berfokus pada *contextual understanding*, yang artinya adalah pendekatan kualitatif dalam memahami suatu fenomena tergantung pada pemaknaan situasi atau konteks yang berlaku.

Pemahaman suatu fenomena atau situasi dalam pendekatan kualitatif adalah tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan setiap fokus fenomena ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, ada ciri khas dan keunikannya sendiri sehingga tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Validasi atau keabsahan dalam pendekatan kualitatif lebih ditekankan pada pengalaman, sebab semua yang diungkapkan oleh informan tersebut merupakan data yang terpenting dalam pendekatan kualitatif

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif yang seperti penelitian kualitatif bahwa ingin menggambarkan mengenai topik penelitian yang diambil oleh peneliti. Metode deskriptif menurut Nazir (2013: 54) sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Metode deskriptif ini digunakan oleh peneliti dalam meneliti kesejahteraan masyarakat yang didapat dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang untuk dapat menggambarkan temuan-temuan penelitian secara sistematis, berupa fakta, dan terjamin keakuratan datanya.

1.4.1 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah studi kasus, karena peneliti merasa bahwa pendekatan ini yang paling tepat untuk menggali data yang akurat. Yin (Bungin 2005: 64-65) menyatakan bahwa study kasus adalah suatu *inquiry empiris* yang memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tak tampak secara jelas. Kelebihan dari studi kasus sebagai berikut :

1. Studi kasus dapat membirkan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
2. Studi kasus dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia.
3. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam, dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.

1.4.2 Teknik Pemilihan Sumber Data

Sumber data yang dipilih untuk kebutuhan penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

No.	Judul	URL	doi	author	vol
1	Model Corporate Sosial Responsibility (Csr) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal	http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/articel/view/278/270	http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.278	Antonius Suhadi AR Febrian Sri Turatmiyah	Vol 14, No 1 (2014)
2	Implementasi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Pada PT. PELINDO III Surabaya	http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas/articel/view/906	https://doi.org/10.21070/jas.v1i2.906	Andrianto	Vol 1 No 2 (2017)
3	Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibilities (Csr) Pt. Indo Tambangraya Megah Tbk Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Bontang Lestari	http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/articel/view/470	http://dx.doi.org/10.30872/jar.v1i2.470	Muhammad Deddy Arianto Achmad Djumlani Rosa Anggraeny	Vol 1 No 2 (2013)

- | | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------------------|
| 4 | Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Ptpn V di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak | http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jrmdk/article/view/7844 | http://dx.doi.org/10.24014/jrmdk.v1i4.7844 | Muhammad Amsor Darusman | Vol 1
No 4 (2019) |
| 5 | Proses Pelaksanaan Program Csr Bina Lingkungan Komunikasi (Bilikom) Pada Masyarakat Desa Binaan | http://garuda.ristek.brin.go.id/documents/detail/1248119 | https://doi.org/10.30997/jk.v1i2.187 | Undang Suryatna Prasetyo, A.H Agustini | Vol 1
No 2 (2015) |
| 6 | Best Practice Implementasi Corporate Sosial Responsibility (Csr) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina | http://garuda.ristek.brin.go.id/documents/detail/1738143 | https://doi.org/10.14421/welf | Arin Mamlakah Kalamika Ahmad Khabiburohman | Vol 9
No 1 (2020) |

Lingkungan Pt. Taman Wisata Candi (TWC)
Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko) are.2020.091-
01

- 7 Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility (Csr) Pt. Vizi Utama Mandiri (Vum) Di Jorong Sungai Kunyit, Kab. Solok Selatan
<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/470372> <https://doi.org/10.22202/mamangan.1347> Yesi Herlina
Dian Anggraini Oktavia
Elvawati Vol 3
No 1 (2014)
- 8 Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm Mp) Terhadap Produktifitas Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat
<https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=4141> <http://dx.doi.org/10.23887/ijss.v1i1.10165> Bayu Putra Mahendra
Vol 1
No 1 (2017)

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 9 | Analisis Efektivitas Corporate Sosial
Responsibility Dalam Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus pada
Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT.
Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha
Rejosari) | https://journal.uny.
ac.id/index.php/nat
apraja/article/view/
3444 | https://doi.org/
10.21831/jnp.v
1i1.3444 | Maulana Agung
Pratama | Vol 1

No 1 (2013) |
| 10 | Strategi Public Relations Pt. Pelni (Persero)
Mengimplementasi Program CSR Melalui
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan | http://journal.moest
opo.ac.id/index.php | https://doi.org/
10.32509/pusta
kom.v1i1.549 | Retno Intani | Vol 1

No 1 (2018) |

/pustakom/article/view/549

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|----------------------|
| 11 | Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan
Coorporate Sosial Responsibility (CSR) Pt.
Semen Tonasa Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Di Kabupaten Pangkep | http://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/39 | https://doi.org/10.1234/mirai.v2i1.39 | Sinardi Murdani
Mattalatta
Suharwan | Vol 1
No 2 (2016) |
| 12 | Kemandirian Masyarakat Bangka Dalam
Pengembangan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (Studi Kasus pada PT Timah
Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung) | http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1531 | https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1531 | Nurul Aini
Dasim Budimansyah | Vol 1
No 2 (2016) |

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----------------------|
| 13 | Efektivitas Program Corporate Sosial Responsibility Pt Timah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Keluarga Miskin Di Asrama Kelas Beasiswa Bangka Belitung | http://jurnal.polteke.sos.ac.id/index.php/peksos/article/view/241 | https://doi.org/10.31595/peksos.v19i1.241 | Dini Abella Febiyan
Aep Rusmana
Yudi Muryanto | Vol 19
No 1 (2020) |
| 14 | Evaluasi Program CSR Pt. Socfindo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagan Raya | http://e-repository.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/13590 | https://doi.org/10.24815/jsu.v13i1.13590 | Baihaqi | Vol 13
No 1 (2019) |

- 15 Pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Corporate Image dan Dampaknya Pada Loyalitas Pelanggan Pt. Pegadaian (Persero) di Pulau Lombok (Kasus Pada Penerima Program Kemitraan) <http://www.jmm.unram.ac.id/index.php/jurnal/issue/view/Juni2018> <http://dx.doi.org/10.29303/jmm.v7i2> Milana Prihatina D.T Dwi Putra Buana Sakti Handry Sudiartha Athar Vol 7 No 2 (2018)
- 16 Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1761085> <https://doi.org/10.32923/sci.v4i1.1038> wulpiah Vol 4 No 1 (2019)

- | | | | | | |
|----|---|---|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 17 | Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Peran Pekerja Sosial Dalam Program Dukungan Keluarga Bagi Lanjut Usia | http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1824209 | https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1931 | Muhammad Akbar | Vol 6

No 1 (2020) |
| 18 | Implikasi Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan Terhadap Kepuasan Penerima Manfaat di Kelurahan Beji Depok | http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1483624 | https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-08 | Muhtadi

Indah Choirunnisa | Vol 3

No 2

(2019) |
| 19 | Pola Pengembangan dan Produktivitas Sapi Potong Program Kemitraan Bina Lingkungan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap Propinsi Jawa Tengah | http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/agripet/article/view/3861 | https://doi.org/10.17969/agripet.v16i1.3861 | Akhmad Sodiq

Pambudi Yuwono | Vol 16

No 1

(2016) |

20	Efektivitas Program Corporate Sosial	http://jurnal.polteke	https://doi.org/	Dini Abella Febiyan	Vol 19
	Responsibility Pt Timah Dalam Meningkatkan	sos.ac.id/index.php	10.31595/peks	Aep Rusmana	No 1
	Kualitas Pendidikan Anak Keluarga Miskin di	/peksos/article/view/241	os.v19i1.241	Yudi Muryanto	(2020)
	Asrama Kelas Beasiswa Bangka Belitung				

Tabel 1.4 Sumber Data Penelitian

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Haris, 2009: 143) studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek yang bersangkutan.

Dokumen penelitian ini juga merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang dan menurut Sumber data menurut Alwasilah (2012: 105) bisa berupa: “Survei atau kuisioner, eksperimen, interview, observasi, analisis dokumen, arsip dan lainnya”. Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, seperti berikut :

- 1) Sumber buku tertulis seperti buku dan jurnal ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi lainnya.
- 2) Pengamatan peningkatan kesejahteraan pada wilayah-wilayah yang mendapatkan bantuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman (1992: 16), yaitu:

1. Pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.
2. Reduksi data. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan di analisis. Hasil dari wawancara, hasil observasi, dan studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing. dalam penelitian ini, peneliti menulis ulang kembali hasil wawancara dan observasi dengan melakukan penyederhanaan data berdasarkan data yang peneliti butuhkan.
3. Display data. Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke

dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema, yang di akhiri dengan memberikan kode (*coding*) dari sub tema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.

4. Kesimpulan/verifikasi. kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dilakukan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Haris, 2010: 158).

1.4.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik uji keabsahan transferabilitas (*transferability*) dan uji keabsahan dependabilitas (*dependability*). Teknik pemeriksaan keabsahan data lainnya yang digunakan oleh peneliti yaitu strategi validasi dari (Crewell, 2010), yaitu:

- 1) Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menyajikan deskripsi yang detail mengenai *setting*, menyajikan banyak perspektif mengenai tema, hasilnya bisa jadi lebih realistis dan kaya.
- 2) Memanfaatkan waktu yang relatif lebih lama (*prolonged time*). Penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami fenomena yang sedang diteliti.

1.5 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Lokasi dan jadwal penelitian Implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di perusahaan berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Peneliti memilih lokasi ini sebagai wadah

melakukan proses penelitian karena kantor pusat PT. Timah Tbk berada di lokasi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, setiap semua yang dilakukan disetiap kehidupan selalu berkaitan dengan orang atau manusia lainnya. Setiap manusia memiliki ketergantungan hubungan dengan manusia yang lain, mereka tidak bisa hidup tanpa adanya hubungan tersebut. Hal ini dikarenakan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi sesama manusia.

Kesejahteraan dalam arti luas meliputi tindakan yang dilakukan manusia dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan spiritual. Dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan. Kesejahteraan sosial meliputi materi/perbekalan dan proses yang berhubungan langsung dengan pengobatan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas hidup.

Kesejahteraan sosial melibatkan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu dan keluarga-keluarga ataupun usaha-usaha untuk memperkuat atau mengubah institusi-institusi sosial. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17) dikutip oleh (Fitri et al., 2015), kesejahteraan sosial adalah:

“Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang”.

Pengertian diatas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui pengelolaan masalah sosial sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi dan membuatnya terus berkembang. Salah satu konsep dari kesejahteraan sosial tersebut adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia, dimana kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia

yang harus dipenuhi sehingga manusia dapat berada dalam keadaan sejahtera di dalam kehidupannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Walter A. Friedlander (Fahrudin, 2012:9) mengenai konsep kesejahteraan sosial yaitu:

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir di dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial merupakan suatu usaha yang memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan Sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi sejahtera yang mencakup seluruh aspek kehidupan, untuk mencapai kondisi sejahtera tersebut diperlukan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkannya.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Penerapan yang dilakukan dilingkungan sosial masyarakat, kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia guna mencapai suatu taraf kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat, terdapat dua tujuan utama dari kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:10) yang dikutip oleh (Fitri et al., 2015) yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan dari kesejahteraan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat diantaranya, dapat terpenuhinya standar kehidupan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menggali sistem sumber yang dapat mengembangkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

2.2. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh terjadinya perkembangan sosial ekonomi. Ketidaksiapan seseorang dalam menghadapi perkembangan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor terjadinya masalah sosial. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi penunjang (*support*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosialkesejahteraan sosial yang lain.

Kutipan diatas mengartikan bahwa adanya fungsi kesejahteraan sosial yang terdiri dari fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, dan fungsi penunjang yaitu untuk membantu proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat yang mengalami

masalah agar keberfungsian sosialnya dapat digunakan kembali dilingkungannya melalui penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

2.2.1 Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam pelayanan atau usaha kesejahteraan sosial memiliki bidang-bidang yang saling terkait, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait satu dengan lainnya. Menurut Fahrudin (2012 : 11) yang dikutip (Fitri et al., 2015) oleh bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

- 1) Kesejahteraan anak dan keluarga
- 2) Kesejahteraan remaja dan generasi muda
- 3) Kesejahteraan orang lanjut usia
- 4) Pelayanan kesejahteraan sosial umum (public sosial welfare service)
- 5) Pelayanan rekresional
- 6) Pelayanan sosial koreksional
- 7) Pelayanan kesehatan mental
- 8) Pelayann sosial medis
- 9) Pelayanan sosial bagi penyandang cacat
- 10) Pelayanan sosial bagi wanita
- 11) Pelayanan sosial dan perumahan dan lingkungan.

2.3 Tinjauan Pelayanan Sosial

2.3.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik di luar maupun dari dirinya. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pelayanan sosial menurut Khan yang dikutip oleh (Fahrudin, 2012:51) adalah:

“Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk

memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.”

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalahnya.

Kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan sosial yang terdapat dalam sebuah masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dimilikinya agar terjalin sebuah keberfungsian sosial (*sosial functioning*) masyarakat itu sendiri baik secara individu maupun kelompok. Pelayanan sosial yang diungkapkan menurut Sainsbury (1997) yang dikutip oleh Fahrudin (2012:50) yaitu sebagai berikut:

“Pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggungjawab sosial dan yang tergantung pada perorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Pelayanan-pelayanan sosial secara luas ini, meliputi kesehatan, pendidikan, pemeliharaan penghasilan, perumahan dan pelayanan sosial personal”.

Pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang digunakan oleh semua orang, dimana orang tersebut memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhan sosial dan mengurangi masalahnya. Bantuan dari publik dan organisasi sangat dibutuhkan dalam pemecahannya.

Pelayanan sosial dalam arti luas adalah setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak yang terlantar, keluarga miskin, cacat dan sebagainya. Mengkaji kualitas pelayanan sebuah lembaga, pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap sistem kelembagaan secara menyeluruh. Pendekatan penilaian ini dapat dinamakan sebagai Model Sistem Keseluruhan. Secara sederhana pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap tiga komponen sub-sistem kelembagaan yang meliputi Masukan, Proses, dan Keluaran. Karenanya model ini dapat pula dinamakan sebagai Model MPK (Masukan Proses-Keluaran).

2.3.2 Tujuan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial memiliki tujuan yang harus dijalankan, hal ini dilakukan agar pelayanan sosial yang diberikan bisa mencapai apa yang di inginkan. Beberapa tujuan dari pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Soetarso (2004), yaitu:

1. Melindungi atau memulihkan kehidupan keluarga
2. Membantu individu untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya.
3. Meningkatkan proses perkembangan, yaitu membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.
4. Mengembangkan kemampuan orang untuk memahami, menjangkau, dan mengusahakan pelayanan yang dibutuhkan

2.3.3 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu Fungsi pelayanan sosial menurut Alferd J. Kahn (1979) adalah:

1. Pelayanan Sosial Untuk Sosialisasi dan Pengembangan

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan berbagai kegiatan. Misalnya pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai dan pengembangan hubungan sosial. Tindakan pencapaian dapat bersifat formal, semi formal, non formal.

2. Pelayanan Sosial untuk Penyembuhan, Perlindungan dan Rehabilitasi

Pelayanan sosial ini ditujukan untuk membantu perorangan yang menghadapi masalah sosial, dengan jalan mempergunakan kelompok primer untuk memperkuat atau menggantikan fungsi-fungsi yang sudah tidak ada lagi atau yang mengalami lagi berbagai gangguan. Pelayanan ini dapat pula berupa bantuan singkat, intensif, dan pribadi sifatnya, yang terkait dengan program-program perbaikan situasi lingkungan sosial antara orang atau unsur-unsur kepribadiannya.

3. Pelayanan Sosial untuk Akses

Pesatnya pelayanan sosial dan motivasi yang beraneka ragam diantara para perencana dan besarnya beban kasus serta tenaga yang terlibat didalamnya. Kesemuanya ini menyebabkan perlunya pelayanan untuk meningkatkan kemampuan orang menjangkau dan menggunakan pelayanan.

2.3.4 Bentuk Pelayanan Sosial

Terdapat beberapa bentuk di dalam pelayanan sosial, diantaranya:

1. Rehabilitasi Sosial

Suatu upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dilaksanakan secara persuasive, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan Sosial

Skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan atau tunjangan berkelanjutan. Jaminan sosial diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, terlantar, penyandang disabilitas fisik dan mental, eks penderita kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi, para pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.

3. Pemberdayaan Sosial

Semua upaya yang diarahkan bagi warga negara Republik Indonesia yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan meningkatkan peran serta perorangan maupun kelembagaan sebagai potensi dan sebagai sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumberdaya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan Sosial

Upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dana tau bantuan hukum.

2.3.5 Tugas Pelayanan Sosial

Tinjauan tugas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus dalam tugas-tugas yang dimiliki oleh pelayanan sosial. Pelayanan sosial memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Memperkuat dan memperbaiki fungsi keluarga dan peranan sosial mereka.
- 2) Menyediakan saluran kelembagaan baru untuk memenuhi berbagai fungsi sosialisasi, pengembangan dan pemberian bantuan.
- 3) Mengembangkan bentuk lembaga baru untuk melaksanakan kegiatan baru yang sangat diperlukan oleh perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat industry perkotaan yang konflik.

Jadi, pelayanan sosial tidak hanya mengantri atau berusaha memperbaiki keluarga atau bentuk organisasi sosial masa lampau, tetapi merupakan tanggapan baru terhadap situasi sosial baru.

2.4. Tinjauan Masalah Sosial

2.4.1 Pengertian Masalah Sosial

Penanganan masalah sosial diawali dengan identifikasi masalah yang dapat memberikan kesadaran akan adanya masalah sosial tertentu. Fenomena masalah sosial dapat dipahami dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam mempelajari masalah sosial telah berkembang pemikiran, masing-masing pemikiran tersebut memiliki sudut pandang dan alur berpikir yang berbeda dalam penjelasannya. Definisi Masalah sosial menurut Soekanto (2013: 314) adalah sebagai berikut :

Masalah sosial merupakan suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan sosial.

Masalah sosial menurut pernyataan tersebut masalah sosial dianggap sebagai persoalan yang timbul secara langsung pada kondisi dan proses sosial. Masalah sosial menyangkut pada nilai sosial dan moral sosial, masalah tersebut menjadi persoalan karena bersifat menyimpang dan merusak. Masalah sosial menurut Robert K Merton dalam Huraerah (2011: 5) adalah sebagai berikut

“Masalah sosial mendefinisikan dengan menyebutkan ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya, ciri-ciri masalah sosial itu adalah adanya jurang perbedaan yang cukup signifikan antar standar-standar sosial dengan kenyataan sosial”.

Oleh karena itu, menurut Merton Masalah Sosial selalu mengacu pada jurang antara harapan-harapan yang ada, baik pada seseorang individu maupun suatu kelompok, dengan kenyataan-kenyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan apa yang bisa tercapai, bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan apa yang dapat diperoleh orang dalam suatu masyarakat. Dari definisi di atas dijelaskan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi antara keinginan dan harapan yang tidak sesuai, serta kurangnya pemecahan masalah yang terjadi.

2.4.2 Komponen Masalah Sosial

Menurut Parillo (1987: 14) dalam Soetomo (2013: 6) menyatakan: “Masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberadaan empat unsur tadi.” Komponen-komponen yang terdapat dalam masalah sosial adalah sebagai berikut :

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan

Menurut Parillo yang dikutip Soetomo (1995: 14) dalam Huraerah (2011: 25) yang menyatakan untuk dapat memahami pengertian masalah sosial perlu memperhatikan komponen-komponen sebagai yaitu :

- 1) Masalah itu bertahan untuk satu periode tertentu.
- 2) Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental baik pada individu maupun masyarakat
- 3) Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat

4) Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan

Komponen tersebut saling berhubungan diantara satu dengan yang lain, masalah sosial hanya dapat bertahan diwaktu tertentu, dapat dirasakan banyak orang, menimbulkan kerugian dan barulah membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah sosial tersebut.

2.4.2 Karakteristik Masalah Sosial

Karakteristik masalah sosial jika dilihat dari aspek-aspek tertentu, kriteria masalah sosial dapat dilihat secara sempit dan sebelah mata, karakteristik masalah sosial sebenarnya memiliki kriteria yang dapat ditetapkan secara jelas dan tepat. Karakteristik masalah sosial menurut Suharto (2008: 71) adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi yang Dirasakan Banyak Orang Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai beberapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kriminalitas adalah contoh masalah sosial.
- 2) Kondisi yang Dinilai Tidak Menyenangkan. Menurut paham Hedonisme, orang cenderung memulai sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Peran masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran 'baik' atau 'buruk' sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkoba, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila nilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum.
- 3) Kondisi yang Menuntut Pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan jika seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasakan bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

- 4) Pemecahan Tersebut Harus Dilakukan Melalui Aksi Sosial Secara Kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah sosial Individual dapat diatasi secara perorangan atau satu persatu tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (social engineering) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.4.4 Jenis-jenis Masalah Sosial

Masalah atau problema adalah perbedaan antara (yang seharusnya, yang diinginkan, yang dicita-citakan dan yang diharapkan) adalah perbedaan yang diidealkan dan yang real. Contoh kan kita mencita-citakan masyarakat yang sejahtera, ternyata yang terjadi banyak masyarakat yang miskin. Kita menginginkan masyarakat yang cinta damai, yang terjadi malah masyarakat yang sering tauran dan bentrok antar masyarakatnya.

2.5 Tinjauan Bantuan Sosial

2.5.1 Pengertian Bantuan Sosial

Program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM) PT. Timah Tbk berupaya membantu pemerintah untuk meningkat kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui bantuan sosial, dengan adanya bantuan sosial ini diharapkan beban masyarakat miskin dapat berkurang. Namun tidak hanya peran pemerintah saja yang menangani masalah ini. Masyarakat pun harus ikut terlibat dalam penyaluran bantuan sosial ini agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Supriyanto (10:2014) bantuan sosial yaitu:

Bantuan sosial sebagai bantuan yang ditargetkan kepada rumah tangga yang termasuk kedalam segmen terbawah dalam dari distribusi pendapatan dan disediakan untuk mencegah terjadinya kesulitan ekstrem diantara penduduk yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, meminimalkan disinsentif untuk tenaga kerja dan meningkatkan kecukupan bagi rakyat miskin.

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa bantuan sosial di fokuskan untuk keluarga yang pendapatannya minim yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dengan bantuan sosial dapat mencegah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang disebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi mereka mereka sendiri dan bantuan sosial ini diharapkan mengurangi beban dari orang miskin tersebut. Menurut Rahayu Lestari (2:2012) Ada beberapa program bantuan sosial yang diselenggarakan di Indonesia yaitu:

1. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Beasiswa pendidikan siswa/mahasiswa miskin.
2. Bidang kesehatan meliputi program jamkesmas di puskesmas dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III.
3. Bidang pemberdayaan masyarakat (PNPM perdesaan mencakup kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Pedasaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial ekonomi wilayah.
4. Bidang Perlindungan Sosial, Meliputi Program keluarga Harapan/PKH dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.

2.5.2 Syarat Penerimaan Bantuan

Syarat penerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang diatur dalam pasal 24 permendagri nomor 32 tahun 2011 yang dikutip oleh lapanda (24:2015) bahwa pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
2. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenaan
3. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran: serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu dalam berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan lepas dari risiko sosial.
4. Sesuai tujuan penggunaan, yang diartikan meliputi
 - a. Rehabilitasi sosial
 - b. Perlindungan sosial
 - c. Pemberdayaan sosial
 - d. Jaminan sosial
 - e. Penanggulangan kemiskinan dan
 - f. Penanggulangan bencana

Menurut peraturan menteri dalam negeri pasal 25 nomor 32 tahun 2011 telah memberi batasan atas tujuan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 6 sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat, agar keberlangsungan hidupnya dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2.6 Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat

2.6.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat lazim digunakan oleh banyak kalangan seperti para pembuat kebijakan dan keputusan, kalangan profesi dan praktisi, pekerja sosial termasuk kelompok-kelompok profesional berbagai argumentasi-argumentasi praktis maupun ilmiah yang ditampilkan melalui karya dan tulisan tentang pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian dijadikan patokan dalam rangka menyiasati seluruh peran dan gerak dalam merumuskan program-program pemberdayaan kepada masyarakat.

Dalam kaitan ini, menjadi penting bagi pekerja sosial untuk memahami konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan tugas praktik pekerjaan sosial di tengah-tengah masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan caracara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224) yaitu; pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife,1995). Lebih lanjut dikatakan oleh Parson, et all (1994), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan memengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Swift dan Levin (1987) mengungkapkan bahwa pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Konsep pemberdayaan masyarakat, banyak juga dikemukakan oleh ahli lain, yaitu salah satunya adalah Payne (1997:226), yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna: *“To help clients power of decision and action over their own lives by reducing the effect of sosial or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and selfconfidence to use power and by transferring power from the environment too clients”* (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.) Lebih lanjut dikatakan oleh Shardlow (1998:32), pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.

Ide atau gagasan yang sama juga disampikan oleh Biestek (1961), yang dikenal dalam pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama *‘self determination’*. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi external (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Sennet, Cabb (1972) dan Conway menyatakan bahwa ketidak berdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaann pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997). Ketidak berdayaan menurut Seeman (1985), Seligman (1972) dan Learner (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian.

2.5.2 Strategi Pemberdayaan

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual meskipun pada gilirannya ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, meso, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, stress management, krisis intervensi. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugastugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*Task Centered Approach*).
2. Aras Meso. Pemberdayaan dilakukan pada sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi sistem besar (*large sistem strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.7 Tinjauan Pengembangan Masyarakat

2.7.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.

Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan anatara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu.

Sedangkan menurut Twelvetrees pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions”* Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama.

Maka dari itu, pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial serta memiliki pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2.7.2 Prinsip Pengembangan Masyarakat

Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan mengartikulasikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.
- b. Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat

melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

- c. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
- d. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.

2.7.3 Manajemen Pengembangan Masyarakat

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan *community-based management* (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Ada enam tahap dalam melakukan perencanaan program diantaranya yaitu :

1. Tahap problem posing (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dari kelompok sasaran. Masyarakat pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi.

Namun, hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial dalam tahapan ini adalah memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi diantara warga dari kelompok sasaran.

2. Tahap problem analysis (analisis masalah). Tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Tahap penentuan tujuan (aims) dan sasaran (objectives). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan statement tentang petunjuk umum. Contoh visi pengembangan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah pembentukan masyarakat dimana seluruh warganya terlibat secara aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi dan politik yang ada dapat menjamin persamaan secara maksimal dikalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan. Sementara sasaran lebih bersifat khusus dibandingkan tujuan. Pekerja sosial menetapkan apa yang menjadi kepercayaan dan apa yang akan dicapai kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatankegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan dapat diungkapkan secara jelas kepada warga. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda-beda dan sering disusun dalam berbagai tahap. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Untuk memahami tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah dan pendek dipahami dari sesuatu yang luas ke spesifik, dari yang abstrak ke kongkrit.
4. Tahap action plans (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memerhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan stakeholder, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

5. Tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika berada dalam tahapan ini dituntut untuk memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan.
6. Tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus menerus, baik secara formal maupun semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, dan bahkan harian.

2.7.4 Strategi Pengembangan Masyarakat

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu:

- a. *The growth strategy*, Strategi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.
- b. *The welfare strategy*, Strategi kesejahteraan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada pemerintah.
- c. *The Responsitive Strategy*, Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.
- d. *The Intergrated or Holistic Strategy*, Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang dibutuhkan yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

2.7.5 Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran juga potensial menguatkan kapasitas (*capacity buliding*) sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi keertinggalan, keterbelakangan, kemerosotan moral, ketunaan, kebodohan, ketakberdayaan dan kemiskinan. Beberapa fungsi strategis dari pengembangan masyarakat menurut Suharto yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
- b. Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- c. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.
- d. Menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
- e. Meminimalisir kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan deskriminasi dan ketelantaran melalui strategi pemberdayaan masyarakat.

2.7.6 Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata.
- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota.
- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.

- j. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Menguatkan daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- l. Mengurangi angka pengangguran.
- m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga grass roots.
- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- o. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga grass roots.
- q. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- r. Menguatkan kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

2.7.7 Model Pengembangan Masyarakat

Jack Rothman mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu :

- a. pengembangan masyarakat lokal (*Locality development*) Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.
- b. Perencanaan sosial Perencanaan sosial dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi) .
- c. Aksi sosial Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur.

Mereka miskin sebab dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

Model pengembangan masyarakat juga diterapkan dalam ruang organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam kegiatan pengembangan masyarakat LSM menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

- a. *The Welfare Approach* Pendekatan ini dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu contohnya kepada mereka yang terkena musibah. Pendekatan ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan berupa pelayanan kesehatan, penyediaan makanan dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. *The Development Approach* Pendekatan yang dilakukan dengan cara memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Pendekatan ini dijalankan melalui program pendidikan dan latihan bagi tenaga NGOs dan pemerintah yang berkecimpung pada bidang pengembangan masyarakat.
- c. *The Empowerment Approach* Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pendekatan *empowerment approach* bertujuan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat lapis bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan pada setiap bidang dan sektor kehidupan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melindungi dan membela pihak yang lemah.

2.8 Konsep Perusahaan

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri.

Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Lini bisnis sebuah perusahaan biasanya akan menentukan struktur bisnis yang dipilih perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya; kemitraan, perseorangan, atau korporasi. Struktur bisnis juga menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan bertempat di suatu bangunan fisik di lokasi tertentu dalam menjalankan operasionalnya, memiliki catatan administrasi terkait produksi dan struktur biaya, serta terdapat beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap operasional dan risiko bisnis/ usaha.

Menurut UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi bila ada sebuah organisasi yang bertujuan menghasilkan laba dan dilakukan secara terus menerus di Negara Indonesia, maka organisasi tersebut disebut badan usaha. Ini bisa dalam bentuk CV, perusahaan, firma dan sebagainya.

Menurut M. Polak, sebuah perusahaan dikatakan ada apabila di dalamnya ada perhitungan tentang laba dan rugi yang dicatat di dalam pembukuan. Di samping itu, istilah ini mengacu pada sebuah tempat yang menjadi pusat kegiatan produksi dan faktornya. Ada perusahaan yang didaftarkan pada pemerintah dan ada pula yang tidak. Jika terdaftar di pemerintah, mereka artinya memiliki badan usaha dan badan usaha ini merupakan status yang terdaftar di perusahaan secara resmi. Di Indonesia sendiri, ada 14 macam bentuk perusahaan yang bisa kita pelajari, antara lain:

- A. Commanditaire Vennootschap-limited partnership
- B. Koperasi
- C. Firma (FA)
- D. Maatschap
- E. Persekutuan Komanditer (*Limited Partnership*)
- F. Penamaan Modal Asing
- G. Penanaman Modal Dalam Negeri
- H. Persekutuan Pedata
- I. Perusahaan Umum

- J. Perusahaan Jawatan
- K. Perseroan Terbatas
- L. Perseroan Terbuka (P.T. Tbk)
- M. Usaha Dagang
- N. Yayasan

2.8.1 Unsur-Unsur Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha, setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contoh: Usaha dagang, CV, PT, Koperasi, dan lain-lain.
2. Kegiatan di Bidang Ekonomi, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan.
3. Terus-menerus, artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terus menerus dan bukan kegiatan insidental.
4. Bersifat Tetap, kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang.
5. Diketahui Publik, artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh undang-undang Republik Indonesia.
6. Mendapatkan Laba, tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha.
7. Pembukuan, sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha.

2.9 Konsep Program

Program merupakan komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat program kerja yang dimana program ini telah di susun sedemikian rupa untuk dilaksanakan sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur, untuk memahaminya silahkan baca uraian selengkapnya dibawah ini.

2.9.1 Tujuan Program

1) Mewujudkan visi misi perusahaan

Jika program dilaksanakan secara baik maka organisasi akan menjadi efektif dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Memang kepengurusan dalam organisasi memiliki jangka waktu tertentu, sering bergonta-ganti kepengurusan dan tujuannya tidak dapat tercapai dalam waktu yang dekat tapi dengan program kerja yang dilaksanakan dengan baik maka akan mendekatkan organisasi tersebut kepada tujuan utamanya.

2) Membantu menjawab Kebutuhan Organisasi

Program kerja yang terencana dan tepat akan memberikan solusi bagi semua persoalan yang akan dihadapi oleh organisasi, baik itu persoalan yang datangnya dari dalam maupun dari luar organisasi. Sehingga organisasi dapat membuat strategi yang tepat untuk memecahkan persoalan sehingga targetnya dapat tercapai.

3) Membantu Organisasi Bekerja Secara Sistematis dan Terstruktur

Dengan program kerja yang baik maka dapat membantu setiap anggota pada organisasi bekerja secara sistematis dan terstruktur, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat.

2.9.2 Manfaat Program

1) Memunculkan Rasa Kebersamaan di Dalam Organisasi

Setiap anggota organisasi akan memiliki rasa kebersamaan dalam melakukan kegiatannya, karena perencanaan program kerja telah di sepakati bersama, yang sehingga tujuan organisasi menjadi tujuan bersama juga.

2) Memunculkan Rasa Tanggung Jawab Terhadap Tugas Masing-Masing

Dengan program kerja yang telah disepakati bersama maka setiap anggota pada organisasi akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dengan setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab maka dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

3) Citra Baik Organisasi Semakin Baik

Pihak yang berada di luar organisasi seperti masyarakat akan melihat bahwa organisasi tersebut bekerja secara efektif, terstruktur dan berperilaku baik dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat citra organisasi tersebut semakin baik.